

Judul : Revisi UU MD3" PKS dapat posisi pimpinan MKD
Tanggal : Kamis, 22 Desember 2016
Surat Kabar : Seputar Indonesia
Halaman : 6

== REVISI UU MD3

PKS Dapat Posisi Pimpinan MKD

JAKARTA – Revisi Undang-Undang Nomor 17/2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) memberi ruang yang luas bagi DPR untuk mengakomodasi kepentingan sejumlah partai politik. Setelah menyepakati menambah satu kursi pimpinan DPR dan MPR untuk Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), kemarin kembali diputuskan untuk menambah satu kursi pimpinan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) untuk Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Keputusan tersebut diambil berdasarkan hasil rapat Badan Legislasi (Baleg) DPR yang digelar di masa reses.

Wakil Ketua Baleg Firman Subagyo mengatakan fokus revisi terbatas UU MD3 ini dilakukan pada tiga poin, yaitu penambahan satu kursi wakil ketua DPR, satu kursi wakil ketua MPR, dan satu kursi wakil ketua MKD.

"Sekarang ini pimpinan MKD kan empat, padahal kalau kita lihat struktur di masing-masing AKD (alat kelengkapan dewan) kan semuanya lima, hanya MKD ini yang empat. Jadi, haknya MKD mungkin itu," ujarnya kemarin.

Menurutnya, tahapan harmonisasi RUU MD3 yang pertama adalah membahas substansi perubahan dan konteks aturan hukumnya. UU yang baru harus sejalan dengan aturan yang dirujuknya; di antaranya UU tentang pembuat-

an peraturan perundang-undangan. Dia belum bisa menjamin apakah pembahasan revisi terbatas UU tersebut bisa selesai pada masa reses ini atau akan diteruskan saat tiba masa sidang berikutnya.

Sebelumnya, PKS menagih jatah kursi pimpinan atau ketua MKD yang sempat diduduki oleh anggota fraksinya. Saat ini posisi tersebut diduduki Sufmi Dasco Ahmad dari Fraksi Partai Gerindra.

Anggota Komisi IV dari Fraksi PKS Tifatul Sembiring mengusulkan penambahan satu wakil ketua MKD. Saat ini MKD terdiri atas satu ketua dan tiga wakil ketua. Menurutnya, jika permintaan tersebut dikabulkan, anggota fraksi PKS dapat kembali menduduki kursi ketua sebagaimana sebelumnya.

"Nanti kita lihat, tapi kalau secara fatsun PKS itu ketua MKD. Itu yang kami minta dikembalikan," ujarnya kemarin.

Menurutnya, usulan itu tidak disampaikan secara mendadak, tetapi telah disampaikan jauh-jauh hari sebelum wacana penambahan kursi DPR dan MPR mencuat. Karena itu, dia berharap usulan ini dapat diakomodasi demi menghindari ketidakpercayaan terhadap pimpinan DPR.

"Jadi kalau fatsun itu tidak dipenuhi, tentu akan memunculkan *distrust*," ujarnya.

● **mula akmal**